

Analisis Pembangunan Desa: Studi pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Pencapaian SDGs Goal 9 (Infrastruktur di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana)

¹Regita Cahyani Al-Munawara

¹Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email: cahyaniregita471@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-9 tentang infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba telah menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas publik. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan meliputi keterbatasan sumber daya (dana dan material), kondisi geografis dan cuaca, serta partisipasi masyarakat. Meskipun menghadapi kendala pendanaan dan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, jembatan penghubung, dan drainase telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mobilitas, efisiensi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba berkontribusi terhadap pencapaian SDGs Desa, khususnya dalam memperkuat konektivitas wilayah, mendorong produktivitas ekonomi lokal, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Pembangunan desa, pencapaian, SDGs-9, kesejahteraan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Desa memiliki posisi penting karena menjadi entitas terkecil dalam struktur pemerintahan sekaligus basis utama kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 40% penduduk Indonesia masih bermukim di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha mikro. Kondisi ini menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang menentukan keberhasilan transformasi sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, pembangunan desa bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan strategis dalam upaya mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan desa adalah penyediaan infrastruktur. Infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan jaringan internet berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperluas akses terhadap layanan dasar (Handayani et al., 2023). Pembangunan infrastruktur tidak sekadar berorientasi pada fisik, melainkan juga transformasi sosial-ekonomi yang mendorong produktivitas, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, distribusi barang dan jasa lebih efisien, mobilitas masyarakat meningkat, serta tercipta peluang usaha baru, termasuk di sektor digital.

Pembangunan infrastruktur desa juga selaras dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu tujuan relevan adalah Goal 9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta memajukan inovasi. Indonesia telah mengadaptasi tujuan ini melalui SDGs desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT). Adaptasi tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi standar internasional, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai penelitian menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nugroho (2022) menekankan bahwa capaian SDGs di Indonesia sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Sejalan dengan itu, Suryanto et al. (2019) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur desa memberikan dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pendanaan. Sejak tahun 2015, pemerintah meluncurkan Dana Desa sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan. Namun jumlah Dana Desa yang diterima setiap desa umumnya terbatas serta harus dibagi untuk berbagai program lain, termasuk pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Hasil penelitian Radhi et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan yang didanai melalui Dana Desa cukup efektif dari segi waktu dan biaya. Namun demikian, keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.

Selain pendanaan, tata kelola pemerintahan desa juga menentukan keberhasilan pembangunan. Kapasitas aparatur desa dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi pembangunan sangat bervariasi. Penelitian Rezkia & Yunani (2022) mengungkapkan bahwa Dana Desa dan pembangunan infrastruktur memang berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun, namun pembangunan infrastruktur tidak selalu memberi dampak positif apabila tidak diiringi tata kelola yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat agar manfaatnya lebih optimal.

Tantangan lainnya adalah perubahan iklim, yang meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur akibat banjir, dan longsor. Perubahan iklim berpengaruh pada keberlanjutan infrastruktur, misalnya kerusakan jalan desa akibat banjir berulang. (Burhan, sesa, & Kodrat 2023) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis swadaya masyarakat dapat menjadi strategi adaptasi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim menjadi keharusan agar investasi pembangunan berdaya guna dalam jangka panjang.

Selain aspek teknis, pembangunan infrastruktur juga membawa dampak sosial-ekonomi yang nyata. Jalan desa yang baik dapat menurunkan biaya transportasi hasil pertanian, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas pemasaran pasar. Infrastruktur air bersih meningkatkan kesehatan dan produktivitas kerja masyarakat. Jaringan internet membuka peluang usaha digital, memperluas pemasaran produk. Handayani et al. (2023) menegaskan bahwa infrastruktur sosial-ekonomi berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di desa, khususnya ketika dikaitkan dengan capaian Indeks Desa Menengah (IDM).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tidak semua pembangunan infrastruktur memberikan hasil signifikan. Sebagian infrastruktur terbengkalai karena kualitas konstruksi rendah, kurangnya pemeliharaan, atau karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Suryanto et al., (2019) menunjukkan bahwa pembangunan desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga pada keberlanjutan (*sustainability*) dan relevansi dengan kebutuhan lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami Analisis Pembangunan Desa: Studi pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Capaian SDGs Goal 9, untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan

pembangunan infrastruktur, faktor yang memengaruhi pembangunan infrastruktur, serta dampak pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian program desa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, juga memberikan kontribusi dalam memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa.

SDGs dibentuk pada tanggal 25-27 September 2015 di Markas PBB di New York, yang dihadiri oleh 193 negara. Secara mufakat menyepakati dokumen pembangunan global yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang memuat sebuah agenda pembangunan global dengan 17 tujuan yang terbagi dalam 169 terget yang berlaku dari tahun 2016 hingga tahun 2030 (Koryati, 2004).

SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal. Sehingga tujuan dari pembangunan berkelanjutan untuk mengukur realitas pembangunan baik pada tingkat global, regional, nasional, daerah, hingga tingkat desa. Dengan pembangunan yang mengarah pada kemajuan, khususnya untuk mengakhiri segera bentuk kemiskinan dan kelaparan dimanapun, mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta pengambilan strategi dalam menangani perubahan iklim.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa yang dirumuskan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hingga perkara pemerintahan. Dari implementasi UU No. 6 Tahun 2014 terdapat 2 aspek yakni aspek kewilayahan dan aspek kewargaan untuk mengatur rumah tangga sendiri dan mendapatkan dana desa yang berpotensi mendukung tercapainya SDGs pada tahun 2030 di Indonesia. Sehingga diperlukan kebijakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam percepatan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Tujuan SDGs Desa merujuk pada Permendes PDPTT No. 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, terdapat 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa yaitu 1) Desa tanpa kemiskinan, 2) Desa tanpa kelaparan, 3) Desa sehat dan sejahtera, 4) Pendidikan desa berkualitas, 5) Desa kesetaraan gender, 6) Desa layak air bersih dan sanitasi layak, 7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9) Infrastruktur desa dan inovasi desa, 10) Desa tanpa kesenjangan, 11) Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13) Desa Tanggap Perubahan iklim, 14) Desa Peduli Lingkungan Laut, 15) Desa Peduli Lingkungan Darat, 16) Desa damai dan berkeadilan, 17) Kemitraan dan pembangunan desa, 18). Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Menurut Kuncoro (2010:20) infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Berdasarkan pendapat Mazmanian dan Sebatier (dalam Solihin Abdul Wahab 2008:68) merumuskan proses pelaksanaan (implementasi) sebagai berikut: "Implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai strategi untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Grindle menyatakan, implementasi merupakan metode secara umum dalam aktivitas administrasi yang bisa diamati pada skala program tertentu. Metode implementasi bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditentukan, rencana kegiatan telah tersusun dan biaya telah siap dan telah disalurkan untuk mewujudkan sasaran. Berdasarkan pendapat Bintoro faktor-faktor implementasi adalah sebagai penentu keberhasilan dalam suatu program. Sehingga perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: 1) Perlu diperhatikan dalam menentukan siapa badan atau lembaga yang akan diberi amanat untuk mengkoordinasi suatu program 2) Perlu diperhatikan dalam penyusunan program pelaksanaan yang baik dan jelas. 3) Perlu mengembangkan korelasi kerja yang lebih baik, antara penanggungjawab dengan koordinasi yang baik. 4) Perlu koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama. Menurut Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010:17-19) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain: Kualitas sumber daya manusia, sumber daya finansial, masalah teknis

Laili, (2024) perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis SDGs (Pilar Lingkungan Hidup) di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur telah dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, namun adanya program pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa program tersebut memengaruhi kondisi lingkungan, terutama memengaruhi proporsi ruang terbuka hijau (RTH). Secara keseluruhan, rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi perspektif dalam SDGs, terutama pada pilar pembangunan lingkungan.

Penelitian Kurniawan dan Seftiasari (2024) berjudul implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada infrastruktur dan inovasi di desa wisata Ketapanrame kabupaten Mojokerto memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Ketapanrame serta apa saja inovasi yang telah dilakukan oleh Desa Ketapanrame dalam upaya mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara yang mendalam serta dokumentasi data-data yang diperlukan. Dari data tersebut peneliti melakukan analisis dan didapatkan kesimpulan bahwa Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada pembangunan infrastruktur di Desa Ketapanrame Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan baik. Keberhasilan inovasi Desa Ketapanrame dapat dilihat dari pendapatan asli desa yang mengalami kenaikan serta keterlibatan masyarakat dalam usaha BUMDes sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 899 Kepala Keluarga sebesar 48,4% dari 1.857 Kepala Keluarga.

Radhi et al, (2025) dengan penelitian berjudul Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Melalui Program Dana Desa Kabupaten Pidie Jaya. Hasil dari analisis adalah efektivitas pembangunan infrastruktur perdesaan melalui program dana desa ditinjau dari aspek waktu sebesar 75,63% dengan kategori Cukup Efektif, dan ditinjau dari aspek biaya yaitu 98,82% dengan kategori Efektif, sedangkan tinggi kualitas infrastruktur pada pembangunannya ditinjau dari aspek kualitas mutu beton dengan hasil berkualitas Baik, ditinjau dari aspek arsitektur/estetika dengan hasil berkualitas Baik, dan tinjau dari aspek dimensi proyek dengan hasil juga berkualitas Baik sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur perdesaan melalui program dana desa di Kabupaten Pidie Jaya sudah Efektif dan berkualitas Baik.

Asis, (2022) dengan penelitian efektivitas program SDGs desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Ngabar Ponorogo. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, pelaksanaan program SDGs desa terhadap kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan baik sejalan dengan prioritas penggunaan. Kedua, berdasarkan efektivitas pelaksanaan program SDGs desa terhadap kesejahteraan masyarakat cukup efektif dilihat dari tiga pendekatan pengukuran tingkat efektivitas, yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Ketiga, dampak efektivitas program SDGs Desa terhadap kesejahteraan telah memberikan dampak yang positif, warga masyarakat sudah menikmati dan merasakan hasil dari program SDGs Desa yang

sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Ernawati (2023) penelitiannya berjudul analisis pendekatan komunikasi partisipatif lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga desa memainkan peran yang krusial dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan komunikasi partisipatif, masyarakat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Partisipasi masyarakat meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan lokal, menciptakan rasa memiliki terhadap program, dan meningkatkan efektivitas implementasi. Kesimpulannya lembaga desa berperan penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, pemberdayaan menjadi relevan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kapasitas lembaga desa dan memperkuat mekanisme komunikasi partisipatif untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kemudian dikumpulkan lagi untuk mengumpulkan informasi, dengan tujuan menyajikan informasi tersebut setelah dianalisis untuk memberikan gambaran umum mengenai fakta-fakta yang ada. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pengaturan alami dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln, 1994)

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilaksanakan secara sengaja (*purposive*). Alasan penelitian dilaksanakan di lokasi tersebut yaitu peneliti menemukan permasalahan yang menarik untuk dikaji di tempat tersebut dan berkaitan dengan rumusan masalah yang ditentukan.

Berdasarkan pendapat Moleong (2014), fokus penelitian adalah masalah dari inti yang diperoleh dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Masalah penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (*Inclusion-exclusion*) suatu informasi yang diperoleh dilapangan, jadi fokus dalam penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan fokus dapat menjadi bahan peneliti. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Penelitian ini terfokus pada analisis pelaksanaan pembangunan desa berbasis SDGs, dengan menitikberatkan pada aspek infrastruktur (Goal 9), yang akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pelaksanaan, faktor yang mempengaruhi, serta dampak pembangunan terhadap pencapaian SDGs, dan kesejahteraan Desa di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana.

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak hanya secara pasif tetapi secara aktif berinteraksi secara interaktif dengan peneliti seperti yang peneliti ciptakan (Sugiyono 2017:201). Berdasarkan uraian tersebut maka penentuan informan pada penelitian kualitatif sangat tepat jika didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti itu sendiri sehingga model penentuan informan menggunakan *purposive sampling* (memilih berdasarkan tujuan). Data yang dibutuhkan yang kiranya relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut yang menjadi informan penelitian : kepala Desa, Bendahara Desa, Pendamping Desa, Kepala dusun, Masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2017), data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau mekanik yang biasa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana yang meliputi data-data yang diperoleh dari penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang tergolong jenis penelitian kualitatif. Penelitian

deskriptif adalah strategi peneliti yang di mana di dalamnya peristiwa, fenomena kehidupan individu dan sekelompok individu untuk menceritakan kronologi kehidupan mereka. Sehingga informasi ini diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Adhy, dkk. 2019).

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data berupa sejumlah informasi atau fakta langsung dari lokasi penelitian, yaitu fakta yang langsung ada di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana melalui wawancara langsung dengan responden secara lisan dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu, mencatat dan merekam suara. Data sekunder adalah data berupa buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan data atau dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi: Observasi merupakan proses pengumpulan informasi dengan menjadi pengamat pada orang atau tempat di lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari objek penelitian, tidak terbatas hanya pada observasi tetapi juga pencatatan untuk mendapatkan data yang konkret dan jelas (Sugiyono 2001: 309) Wawancara merupakan sistem tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung bertatap muka, satu sama lain dan masing-masing dapat mendengarkan dialog secara langsung dengan menggunakan alat misalnya perekam atau alat tulis. Wawancara dilakukan agar untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden yang dapat memberi informasi tentang objek yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data primer (Ningrat 1993:29). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiono, 2019). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk data-data, gambar foto saat mengumpulkan data, seseorang. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.

Teknik analisis data pengolahan penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, 2001). a. Peneliti mencatat seluruh data secara objektif dan sebagaimana mestinya sejalan dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, b. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data yang muncul dari catatan lapangan (Patilima, 2005). Mengurangi data berarti membuat ringkasan, memilih hal-hal utama, fokus pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, dan membuang apa yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang berkurang memberikan gambaran yang lebih spesifik dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut dan mencari data tambahan jika diperlukan, c. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dilakukan agar data reduksi dapat tertata dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data penelitian. Pada tahap penyajian data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Penyajian data yang baik merupakan langkah penting untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan reliabel, d. Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan memverifikasi data. Kesimpulan awal yang diajukan masih tentatif dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat untuk menunjang tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menjadi temuan baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau uraian suatu objek yang menjadi jelas setelah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana

Desa Watumelomba merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, wilayah desa ini didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan dengan kondisi topografi berbukit. Mata pencaharian utama masyarakat adalah petani dan pekebun dengan komoditas utama berupa kelapa, kakao, pisang,

nilam, dan jagung.

Sebagai desa yang berada di wilayah pedalaman, Watumelomba menghadapi berbagai tantangan infrastruktur seperti keterbatasan akses jalan, drainase, dan fasilitas dasar lainnya. Oleh karena itu, pemerintah desa menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Desa, khususnya Goal 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mendorong Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan serta Meningkatkan Inovasi.

Pendekatan pembangunan di Desa Watumelomba berorientasi pada konsep pembangunan partisipatif dan berkelanjutan, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sesuai prinsip *no one left behind* dalam SDGs.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas publik. Kepala Desa menjelaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan diawali dengan musyawarah desa (Musdes) yang berfungsi sebagai forum utama untuk menyerap aspirasi, kebutuhan, dan usulan prioritas masyarakat. Melalui forum ini, masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan infrastruktur serta menentukan skala prioritas pembangunan. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang selanjutnya menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan program pembangunan setiap tahunnya, sehingga seluruh proses pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa.

“Pada tahap pelaksanaan pembangunan kami membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dari musyawarah itu kami menyampaikan dokumen RKP kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Masyarakat kita tanya terlebih dahulu warga yang punya wilayah yang akan dibangun jalan, jembatan, drainase, dll apakah mereka mau ikut serta.”(Kepala Desa Watumelomba)

Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip *good governance* melalui keterbukaan informasi, transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Participatory Rural Development* (Chambers, 2017) yang menegaskan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan, memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah desa, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari hasil pembangunan itu sendiri.

Jenis-jenis infrastruktur yang dibangun di Desa Watumelomba meliputi beberapa proyek prioritas, antara lain:

1. Pembangunan jalan usaha tani,
2. Pengerasan rabat beton jalan lingkungan,
3. Pembangunan jembatan penghubung antar dusun,
4. Pembangunan drainase,
5. Pembangunan MCK atau jamban keluarga, dan
6. Rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Program-program tersebut menunjukkan keterkaitan langsung dengan indikator SDGs Desa Goal 9, yang menitikberatkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, perluasan konektivitas ekonomi antar wilayah, serta penyediaan sarana publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperlihatkan adanya integrasi antara kebutuhan lokal dengan arah pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs, di mana pembangunan tidak hanya berfokus pada hasil fisik, tetapi juga pada manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.

Selain pelaksanaan kegiatan fisik, pemerintah desa juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran publik berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan secara berlapis, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta Inspektorat Kabupaten

Bombana yang berperan dalam memberikan supervisi dan penilaian terhadap proses pembangunan di lapangan.

“Terkait masalah proses pemantauan atau pengawasan tentunya pengawasan utama dari BPD dan kemudian dari tokoh masyarakat itu mengawasi langsung terkait pembangunan.”
(Kepala Desa)

Hal ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas publik, sebagaimana dijelaskan oleh Fukuyama (2018), bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif menuntut keterbukaan, integritas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik. Selain itu, kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat untuk merawat dan memelihara hasil pembangunan juga menunjukkan adanya mekanisme keberlanjutan (*sustainability mechanism*) yang tumbuh secara kolektif di tengah masyarakat. Bentuk partisipasi aktif ini tidak hanya menjaga kelestarian infrastruktur yang telah dibangun, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan sosial, solidaritas warga, serta semangat kemandirian dalam mengelola hasil pembangunan desa secara berkelanjutan.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pembangunan Desa Berbasis SDGs

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan menentukan tingkat keberhasilan program pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, serta hasil observasi lapangan, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu faktor sumber daya (dana dan material), faktor lingkungan dan cuaca, serta faktor sosial dan partisipasi masyarakat. Ketiga faktor ini saling berhubungan dan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa yang berorientasi pada pencapaian SDGs Goal 9.

a. Faktor Sumber Daya (Dana dan Material)

Ketersediaan sumber daya, terutama dana dan material, menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan kelancaran pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba. Kepala desa menjelaskan bahwa dana yang tersedia melalui alokasi Dana Desa sering kali belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, apalagi jika dikaitkan dengan target yang lebih luas dari SDGs. Ia menyatakan:

“Dana desa tidak pernah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan, apalagi kalau dikaitkan dengan target SDGs. Kami berupaya melobi untuk mendapatkan tambahan dukungan dana dari kabupaten maupun provinsi.”

Hal ini menggambarkan bahwa keterbatasan anggaran menciptakan kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program pembangunan. Dalam konteks akademik, fenomena ini sejalan dengan temuan Fan dan Zhang (2021) yang menyebutkan bahwa proyek infrastruktur di wilayah pedesaan sering menghadapi kendala kapasitas fiskal yang rendah, kurangnya sumber pendanaan alternatif, serta biaya logistik yang tinggi. Keterbatasan fiskal ini menyebabkan desa harus melakukan prioritas program, dengan menunda atau melaksanakan pembangunan secara bertahap berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat.

Selain keterbatasan dana, faktor geografis turut memperburuk situasi karena lokasi Desa Watumelomba yang relatif terpencil dan sulit diakses menyebabkan biaya material menjadi lebih mahal dibandingkan desa lain yang lebih dekat dengan pusat distribusi barang. Kepala desa menambahkan:

“Biaya material cukup tinggi karena harus didatangkan dari luar desa. Contohnya biaya angkutan semen dari Boepinang ke Watumelomba bisa selisih sampai sepuluh ribu rupiah.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa jarak dan kondisi infrastruktur transportasi yang belum optimal berdampak langsung pada efisiensi biaya pembangunan. Keterisolasian geografis menyebabkan biaya angkut meningkat dan waktu pelaksanaan proyek menjadi lebih panjang. Dalam perspektif teori ekonomi pembangunan wilayah, kondisi ini menggambarkan adanya *geographical disadvantage* yang masih menjadi tantangan utama di banyak daerah tertinggal di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya, baik dari aspek pendanaan maupun ketersediaan material, merupakan variabel kunci yang sangat menentukan

keberlanjutan dan kualitas pembangunan infrastruktur desa.

b. Faktor Lingkungan dan Cuaca

Selain aspek sumber daya, kondisi lingkungan dan faktor cuaca juga menjadi elemen penting yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba. Secara topografi, wilayah desa yang berbukit-bukit dan berada di dataran tinggi menjadikan proses pembangunan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pada musim hujan, misalnya, kegiatan pembangunan sering tertunda karena kondisi jalan licin dan aliran air yang deras, yang dapat merusak hasil pekerjaan sebelumnya.

Masyarakat HS mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara:

“Kadang cuaca tidak mendukung saat kegiatan membangun infrastruktur jalan atau jembatan tiba-tiba hujan jadi proses pembangunan infrastruktur jadi terhambat. Selain itu, anggaran juga terbatas sehingga pembangunan dilakukan bertahap.”

Kondisi geografis dan cuaca ekstrem ini berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan, karena dapat menimbulkan pembengkakan biaya dan penundaan waktu penyelesaian proyek. Hal ini memperkuat temuan UNDP (2019) dalam *Sustainable Rural Infrastructure Report*, yang menekankan bahwa ketahanan lingkungan (*environmental resilience*) dan mitigasi risiko cuaca ekstrem merupakan komponen penting dalam desain pembangunan infrastruktur berkelanjutan di wilayah pedesaan. Dalam konteks Desa Watumelomba, adaptasi terhadap kondisi cuaca dilakukan dengan mengatur jadwal kerja berdasarkan musim, serta memprioritaskan proyek yang bersifat mendesak dan tahan terhadap perubahan iklim.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa faktor lingkungan dan cuaca bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga bagian dari tantangan struktural yang memerlukan strategi adaptif dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

c. Faktor Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Faktor sosial dan partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan tergolong tinggi. Salah seorang responden masyarakat BHR menyatakan:

“Biasanya ada musyawarah desa. Kami dipanggil untuk memberikan usulan, meski tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena tergantung anggaran.”

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa (*Musdes*), yang menjadi forum utama untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembangunan di desa ini telah mengadopsi prinsip partisipatif sebagaimana ditekankan dalam teori pembangunan berbasis masyarakat (*Community-Based Development*).

Namun demikian, dalam praktiknya partisipasi masyarakat juga diwarnai oleh dinamika sosial yang kompleks. Kepala desa menjelaskan bahwa kadang muncul perbedaan pendapat di masyarakat, terutama dalam hal penentuan lokasi proyek, penggunaan lahan, atau persoalan teknis lainnya. Ia menyampaikan:

“Sering terjadi perbedaan pendapat seperti masalah timbunan atau lahan. Dalam kondisi itu kami berusaha memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan.”

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola hubungan sosial dan membangun konsensus. Hal ini sesuai dengan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2018), yang menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan warga sangat bergantung pada proses deliberatif dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial dan partisipasi masyarakat berperan penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan hasil pembangunan. Partisipasi bukan hanya dimaknai sebagai keterlibatan fisik, tetapi juga sebagai wujud komitmen kolektif untuk mendukung pembangunan desa yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya

(dana dan material), kondisi geografis dan cuaca, serta dukungan sosial dan partisipasi masyarakat merupakan elemen penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba. Ketiga faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Ketika dukungan masyarakat tinggi dan perencanaan dilakukan secara partisipatif, maka kendala sumber daya dan lingkungan dapat diminimalisir. Sebaliknya, ketika faktor sosial melemah atau partisipasi rendah, maka pembangunan fisik berpotensi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pembangunan desa ke depan perlu memperhatikan keseimbangan antara kapasitas sumber daya, ketahanan lingkungan, dan penguatan kelembagaan sosial untuk memastikan tercapainya pembangunan infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan arah SDGs Goal 9.

Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pencapaian Program Desa dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa

Dampak pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu (1) dampak ekonomi dan (2) dampak sosial, yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama dalam mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-9, yakni membangun infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta data pendukung lainnya, terlihat bahwa berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan usaha tani, drainase lingkungan, serta jembatan penghubung antar dusun telah memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi masyarakat Desa Watumelomba.

a. Dampak Ekonomi

Hampir seluruh responden menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan efisiensi ekonomi masyarakat desa. Salah seorang warga Bpk. KM menuturkan:

“Dulu kalau mau angkut hasil kebun seperti kelapa, coklat, Nilam, atau jagung susah karena jalan rusak. Sekarang kendaraan bisa masuk sampai ke kebun, jadi biaya angkut lebih murah dan pendapatan petani meningkat.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa keberadaan infrastruktur jalan usaha tani secara langsung memengaruhi produktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelum adanya pembangunan, masyarakat sering menghadapi hambatan besar dalam mengangkut hasil pertanian ke pasar karena kondisi jalan yang rusak parah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Setelah adanya pembangunan jalan, waktu tempuh distribusi hasil kebun menjadi lebih singkat, biaya transportasi menurun, dan daya saing produk pertanian meningkat secara signifikan.

Dampak ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sejalan dengan indikator SDGs Goal 9 yang menekankan pentingnya infrastruktur berkualitas untuk memperkuat sektor ekonomi lokal dan mendorong industrialisasi inklusif. Menurut Damanik & Widodo (2020), pembangunan jalan pedesaan meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian, mengurangi biaya logistik, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang ekonomi baru di wilayah pedesaan. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya memperkuat basis ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan konektivitas ekonomi yang lebih luas, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip *resilient infrastructure* pada SDGs ke-9.

Kepala Desa Watumelomba juga menambahkan:

“Dampak terhadap perekonomian sangat positif karena dulu hasil tani dijual murah sebab transportasi sulit, sekarang mobil langsung mengangkut hasil panen dari kebun.”

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mempermudah akses transportasi, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem ekonomi desa yang lebih efisien dan berkeadilan. Hasil-hasil pertanian kini dapat dipasarkan lebih cepat dan dengan harga jual yang

lebih baik, karena berkurangnya ketergantungan masyarakat pada tengkulak dan biaya distribusi yang tinggi. Kondisi ini memperlihatkan perbaikan rantai nilai pertanian desa (*rural value chain*), sesuai dengan konsep *inclusive rural growth* (OECD, 2018), di mana infrastruktur menjadi penghubung utama antara potensi ekonomi lokal dan akses pasar yang lebih luas. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur di Watumelomba telah berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian SDGs ke-9 dengan menciptakan sistem ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

b. Dampak Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Selain memberikan dampak pada sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba juga membawa pengaruh besar terhadap aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan lingkungan dan jembatan penghubung antar dusun turut memperkuat hubungan sosial antar warga serta meningkatkan partisipasi kolektif dalam menjaga hasil pembangunan. Kepala Desa menyampaikan:

“Kami di pemerintah desa selalu mengadakan kerja bakti gotong royong merawat bangunan yang sudah direalisasikan, dan juga melobi anggaran dari PU agar jalan selalu terjaga.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur turut memperkuat nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas warga, dan rasa memiliki terhadap fasilitas desa. Gotong royong menjadi bentuk nyata dari *social capital* atau modal sosial masyarakat desa, di mana warga secara sukarela terlibat dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur dan turut memastikan keberlanjutannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Adi (2020), yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan di pedesaan sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial, partisipasi aktif warga, serta kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa.

Dampak sosial lainnya tampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan membuat masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam setiap keputusan pembangunan. Seorang warga Ibu MH mengatakan:

“Kami senang karena aspirasi masyarakat tetap didengar, dan hasil pembangunan bisa langsung kami rasakan.”

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur telah memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal. Peningkatan *social trust* ini, sebagaimana dijelaskan oleh Putnam (2021), merupakan pondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan kolaboratif.

Lebih jauh, keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan pencapaian SDGs Goal 9 juga terlihat dari aspek sosial ini. Prinsip *no one left behind* yang diusung oleh SDGs tercermin melalui pemerataan manfaat infrastruktur hingga ke dusun-dusun terpencil di Watumelomba. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas umum, ekonomi, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat inklusivitas dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, dampak pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba menunjukkan keterpaduan antara aspek ekonomi dan sosial yang selaras dengan arah kebijakan SDGs ke-9. Pembangunan infrastruktur telah menciptakan konektivitas wilayah yang lebih baik, memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, memperkuat partisipasi sosial, serta membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan kolaboratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba tidak hanya memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip dan sasaran utama SDGs.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis SDGs pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba telah berjalan dengan cukup baik dan mencerminkan prinsip-

prinsip keberlanjutan yang diusung oleh SDGs, khususnya tujuan ke-9 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan inklusif. Proses pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah desa, di mana masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), hingga pengawasan proyek. Transparansi dan akuntabilitas juga diterapkan melalui penyampaian informasi pembangunan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada pemberdayaan warga.

Faktor-faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pelaksanaan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni faktor sumber daya (terutama dana dan material), faktor lingkungan dan cuaca, serta faktor sosial dan partisipasi masyarakat. Keterbatasan dana desa dan mahalnya biaya material akibat lokasi geografis yang terpencil menjadi tantangan utama. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi juga sering menghambat proses pembangunan fisik. Namun demikian, tingginya partisipasi masyarakat dan dukungan sosial dari berbagai pihak menjadi faktor pendukung utama yang menjaga keberlanjutan kegiatan pembangunan. Secara teoritis, hal ini selaras dengan *Collaborative Governance Model* (Ansell dan Gash, 2018), yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lokal.

Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dampak pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, pembangunan jalan usaha tani, rabat beton, jembatan, dan drainase telah meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya transportasi, serta meningkatkan pendapatan petani. Sedangkan dari sisi sosial, kegiatan pembangunan memperkuat nilai-nilai gotong royong, meningkatkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan teori *social capital* Putnam, (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kekuatan hubungan sosial dan partisipasi kolektif masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba mendukung pencapaian SDGs ke-9 melalui peningkatan akses, pemerataan pembangunan, dan inovasi lokal, serta menjadi sarana peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Watumelomba telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjukkan keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meskipun masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan dana, kondisi geografis, dan cuaca, semangat partisipatif dan gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di desa ini.

REFERENSI

- Adhy, dkk. (2019). Penelitian deskriptif dalam studi sosial. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2014). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. 1–8.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Asis Sustiwawan. (2022). Efektivitas program SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ngabar Ponorogo [Skripsi].
- Basri, M. (2022). Pengelolaan, Strategi Desa, Dana Mewujudkan, Dalam Development, Sustainable Di, Goals Somba, Desa Kindang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Basri, Musfira Studi, Program Administrasi, Ilmu Ilmu, Fakultas Dan, Sosial Politik, Ilmu Makassar, Universitas Muham.
- Bintoro. (2008). Implementasi kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Burhan, Sesa, & Kodrat. (2023). Pembangunan infrastruktur berbasis swadaya masyarakat sebagai strategi adaptasi perubahan iklim. *Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan*, 4(2).
- Chambers, R. (2017). *Participatory rural development: Putting the last first*. London: Longman.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Ernawati, S. K. (2023). Analisis pendekatan komunikasi partisipatif lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan*, 5(1).
- Fan, S., & Zhang, X. (2021). Rural infrastructure and economic growth. *World Development Journal*, 134(3), 102–119.
- Fukuyama, F. (2018). *State building: Governance and world order in the 21st century*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Handayani, R., dkk. (2023). Infrastruktur sosial-ekonomi dan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan di desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 12(1).
- Iqbal, Z., & Suleman, A. (2010). *Pembangunan infrastruktur dan tantangan global di negara berkembang*. Jakarta: UI Press.
- Isgianti, M. I. A., Negara, J. A., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2020). Analisis pelaksanaan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat desa sungai cina kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti.
- Iskandar, Abdul Halim. 2020. *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kurniawan, S., & Seftiasari, G. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Infrastruktur Dan Inovasi Di Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 107–119. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/jipsos/article/view/5590>
- Koryati. (2004). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, T. (1999). *Partisipasi Publik, Konsep Dan Metode* (Ernawati & Tedi Kurniawan). 1–30.
- Kurniawan, T., & Ernawati. (1999). *Partisipasi publik: Konsep dan metode* (pp. 1–30). Jakarta: UI Press.
- Laili, TA (2024). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis SDGs (Pilar Lingkungan Hidup) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 25 (01), 25–40. <https://doi.org/10.21009/plpb.v25i01.43148>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2001). *Analisis data kualitatif* (hal. 15). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. (2022). Pembangunan desa dan pencapaian SDGs di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 20(3), 45–60.
- Radhi, F., Maizuar, M., Wesli, W., Fithra, H., & Jalil, A. (2025). Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Melalui Program Dana Desa Kabupaten Pidie Jaya. *Teras Jurnal: Jurnal Teknik Sipil*, 15(1), 149–160. <https://doi.org/10.29103/tj.v15i1.1215>
- Radhi, A., Pratama, R., & Dewi, M. (2023). Efektivitas pembangunan infrastruktur pedesaan dengan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 7(1), 77–89.
- Ramadhani, C. (2022). *Program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar*.
- Rezki, N., & Yunani, R. (2022). Pengaruh Dana Desa dan pembangunan infrastruktur terhadap Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Desa*, 6(1), 33–44.
- Sjafrizal. (2016). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Sugiyono, 2001. *Statistik Untuk Penelitian*. Hal 309, Alfabeta Jakarta.
- Sugiono, 2019. *Metode penelitian kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. Alfabet.
- Suryanto, B., Rahmawati, D., & Yusuf, H. (2019). Dampak pembangunan infrastruktur desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 115–130.

- Sustiawan, A. (2022). Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo. 1–168.
- Tjokromidjoyo, Bintoro. 2000. Teori Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: PT. Gunung Agung
- United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Sustainable rural infrastructure report. New York: UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya, (Amandemen I, II, III dan IV), Penabur Ilmu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, S. A. (2008). Kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zafar Iqbal, & Areef Suleman. (2010). Good governance and development. *Journal of International Development*, 22(4), 411–425.